

SKRIPSI

PENGATURAN KERJASAMA INTELIJEN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM *AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION*

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

FADHLI MAULANA

1310112077

PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



Pembimbing :

Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M. **19521111979031002**

M. Jhon, S.H., M.H. **195708071987021001**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

Nomor Reg.4724/PK VII/II/2017

**PENGATURAN KERJASAMA INTELIJEN INDONESIA DENGAN
AUSTRALIA DALAM *AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY
COOPERATION***

(Nama: Fadhli Maulana, Nomor BP: 1310112077, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 halaman, 2017)

ABSTRAK

Perjanjian Lombok adalah perjanjian bilateral yang mengatur tentang keamanan. Kerjasama intelijen merupakan salah satu ruang lingkup yang ada dalam perjanjian tersebut. Namun sempat terjadi pelanggaran oleh Australia yang menyadap percakapan telepon pejabat tinggi negara Indonesia. Kerjasama ini sempat terhenti dan dilanjutkan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu : 1). Bagaimana bentuk kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*. 2). Bagaimana implikasi kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* dalam menanggulangi kejahatan di masing-masing negara. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam Kerangka Perjanjian Lombok. 2). Untuk mengetahui bagaimana implikasi kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Australia dalam *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation* dalam menanggulangi kejahatan di masing – masing negara. Pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kerjasama intelijen meliputi pertukaran dan analisa informasi. Kerjasama intelijen bermanfaat bagi kedua negara untuk pemberantasan terorisme dan kelompok separatisme Papua, memberantas penyelundupan senjata, sebagai upaya integritas wilayah, pencegahan imigran gelap yang ingin memasuki Australia

Kata kunci : Perjanjian Lombok, kerjasama intelijen, keamanan, Politik Luar Negeri

**REGULATORY INTELLIGENCE COOPERATION BETWEEN
INDONESIA WITH AUSTRALIA WITHIN AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE
FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION**

(Fadhl Maulana, 1310112077, International Law (PK VII), Law Department of Andalas University, 66 pages, 2017)

ABSTRACT

Lombok Treaty is a bilateral agreement to arrange the security. Intelligence cooperation is one of the scope on the agreement. But it had been a violation by australia intercepting phone conversation the president of Indonesia and other supreme state officials. Based on this background can be formulated some issue, namely: 1). How are the forms of intelligence cooperation between Indonesia and Australia in the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation. 2). How are the implications of intelligence cooperation between Indonesia and Australia in the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation in overcoming crime in their respective states. Where the purpose of this research is: 1). To knowing how are the forms of intelligence cooperation between Indonesia and Australia in the Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation. 2). To knowing how are the implications of intelligence cooperation between Indonesia and Australia in the Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation in overcome the crime in their respective states. Approah the problem used is a normative legal research. The collection of data obtained from the literature that the materials consisting of primary legal, secondary, and tertiary. The data were analyzed qualitatively. Result showed that intelligence cooperation including analyze and intelligence exchange. Intelligence cooperation beneficial for both countries to eradicating of terrorism, and papua separatism group, to eradicate of arms smuggling, as effort of territorial integrity, prevention of people smuggling who want to enter Australia

Keyword : Lombok Treaty, intelligence cooperation, security, Foreign Policy